

Genealogi Ethos Integritas di MAN 1 Yogyakarta: Warisan SGHA–PHIN, Sanksi Sosial, Sarasehan MPS, dan Literasi

Wahid Hasyim¹

¹Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta

ABSTRACT

This study examines integrity as an institutional ethos at MAN 1 Yogyakarta by situating it within the historical genealogy of SGHA and PHIN and its manifestation in contemporary socio-cultural practices of the madrasah. The study employs a descriptive qualitative approach with a historical-reflective orientation. Primary data were collected through structured written interviews with key informants who possess institutional experience and knowledge related to the transformation from SGHA–PHIN into MAN, the culture of integrity, and student participation forums through the MPS Sarasehan. Data were analyzed using a descriptive-thematic approach to formulate core themes and present them in interpretive narratives closely grounded in informants' statements. The findings indicate that the institutional transformation from SGHA–PHIN to MAN shifted the educational mandate while preserving integrity as a core value that binds actors across levels. Integrity is upheld through a combination of structural mechanisms and reputation-based social control, including consequences for violations that affect access to opportunities and the legitimacy of student leadership. The MPS Sarasehan reflects communicative integrity through honest and respectful expression of aspirations, although its effectiveness depends on accountable follow-up. Literacy culture is identified as requiring strengthening as a safeguard for academic and moral integrity, particularly in the era of GenAI. The study underscores the importance of balancing firm enforcement with developmental pathways so that integrity continues to function as an educational process for character formation.

Keywords: *institutional integrity, SGHA–PHIN, MPS Sarasehan*

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah integritas sebagai ethos kelembagaan pada MAN 1 Yogyakarta dengan menempatkannya dalam genealogi historis SGHA dan PHIN serta manifestasinya pada praktik sosial-kultural madrasah kontemporer. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berorientasi historis-reflektif. Data utama dikumpulkan melalui wawancara tertulis terstruktur dengan informan kunci yang memiliki pengalaman dan pengetahuan kelembagaan terkait transformasi SGHA–PHIN menjadi MAN, budaya integritas, serta forum partisipasi siswa melalui Sarasehan MPS. Data dianalisis secara deskriptif-tematik untuk merumuskan tema-tema utama dan menuliskannya dalam narasi interpretatif yang dekat dengan pernyataan informan. Temuan menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan dari SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama)–PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) ke MAN menggeser mandat pendidikan, tetapi mempertahankan integritas sebagai nilai inti yang mengikat lintas aktor. Integritas ditegakkan melalui kombinasi mekanisme struktural dan kontrol sosial berbasis reputasi, termasuk konsekuensi atas pelanggaran yang memengaruhi akses kesempatan dan legitimasi kepemimpinan siswa. Sarasehan MPS mencerminkan integritas komunikatif melalui penyampaian aspirasi yang jujur dan santun, namun efektivitasnya bergantung pada tindak lanjut yang akuntabel. Budaya literasi dinilai perlu diperkuat sebagai pagar integritas akademik dan moral, terutama pada era GenAI. Studi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara ketegasan penegakan dan jalur pembinaan agar integritas tetap berfungsi sebagai proses pendidikan yang membentuk karakter.

Kata Kunci: *integritas kelembagaan, SGHA–PHIN, Sarasehan MPS*

OPEN ACCESS **Contact:** muhammadnurazix@gmail.com



Pendahuluan

Isu integritas akademik dan integritas kelembagaan semakin menonjol dalam dunia pendidikan, seiring meningkatnya tekanan performa, kompetisi akses pendidikan lanjutan, serta kemudahan teknologi yang memperluas peluang kecurangan. Literatur menunjukkan bahwa kecurangan ujian dan bentuk-bentuk ketidakjujuran akademik merupakan tantangan lintas negara dan lintas jenjang pendidikan, dengan variasi pendorong yang mencakup norma sebaya, persepsi kontrol diri, hingga konteks budaya yang lebih luas (Zhang, 2023; Zhao et al., 2023). Pada saat yang sama, ekosistem pembelajaran digital dan kemunculan perangkat GenAI memperkuat urgensi penguatan integritas melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak terbatas pada larangan dan pengawasan (Hill et al., 2021; Rasul et al., 2024).

Dalam kerangka tersebut, integritas makin dipahami bukan semata atribut moral individu, melainkan sebagai hasil dari budaya institusi dan iklim etis yang dibangun secara kolektif. Studi mengenai pembentukan budaya integritas menekankan adanya faktor fasilitator dan hambatan pada level sekolah, termasuk kepemimpinan, konsistensi kebijakan, pembiasaan, serta keterlibatan warga sekolah (Campbell & Waddington, 2024; Çelik & Razi, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang ethical climate menempatkan kepemimpinan dan kohesi tim sebagai faktor yang berkelindan dengan efikasi moral, yang pada akhirnya membentuk cara komunitas mengartikan perilaku benar dan salah (Din et al., 2025). Dalam perspektif yang lebih luas, pendidikan yang menumbuhkan kesadaran moral juga dipandang penting untuk mencegah reduksi pendidikan menjadi sekadar pemenuhan target, sehingga integritas tidak dipersempit menjadi kepatuhan prosedural (Friedland & Jain, 2020).

Perdebatan penting dalam literatur adalah bagaimana institusi menegakkan integritas tanpa terjebak pada logika penghukuman yang semata-mata menekan perilaku menyimpang. Sebagian penelitian menyoroti efektivitas penguatan kebijakan dan strategi kepatuhan dalam menurunkan kecenderungan kecurangan pada situasi tertentu (Zhao et al., 2023), namun literatur lain menggarisbawahi perlunya pendekatan edukatif yang membangun pemahaman, kapasitas, dan tanggung jawab, terutama ketika tujuan institusi adalah pembentukan karakter, bukan sekadar kepatuhan (Fudge et al., 2022; Zhu, 2025). Pada ranah disiplin sekolah, praktik restoratif sering dibahas sebagai alternatif atau pelengkap sanksi konvensional, dengan fokus pada pemulihan relasi, akuntabilitas, dan keadilan pendidikan (Anyon et al., 2016; Gomez et al., 2020; Huguley et al., 2022). Tegangan antara deterrence melalui sanksi sosial dan kebutuhan ruang pemulihan menjadi isu yang relevan ketika integritas ditempatkan sebagai ethos pendidikan.

Penguatan integritas juga berkaitan dengan tata kelola partisipasi dan komunikasi di dalam institusi. Literatur student voice menekankan bahwa partisipasi siswa memerlukan mekanisme tindak lanjut yang jelas agar aspirasi tidak berhenti pada seremonial, melainkan menjadi masukan yang direspons dan ditutup dengan umpan balik yang dapat diverifikasi (Young & Jerome, 2020). Pada konteks forum deliberatif, kapasitas deliberasi institusi turut ditentukan oleh desain ruang partisipasi, keterbukaan terhadap kritik, serta kemampuan mengonversi aspirasi menjadi keputusan atau perbaikan prosedur (Kennedy & Pek, 2022). Dengan demikian, integritas tidak hanya berkaitan dengan kejujuran akademik, tetapi juga integritas komunikatif: keberanian menyampaikan kebenaran secara beradab dan tanggung jawab institusi dalam meresponsnya.

Selain itu, integritas akademik bertumpu pada praktik literasi yang membentuk disiplin pengetahuan. Literasi, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup kemampuan menimbang informasi, menyusun argumen, menggunakan sumber secara bertanggung jawab, dan memaknai pekerjaan akademik sebagai praktik etis (Christidis et al., 2025). Sejumlah kajian juga menempatkan literasi akademik sebagai wahana internalisasi etos keilmuan, termasuk penanaman tanggung jawab terhadap klaim dan bukti, yang pada akhirnya selaras dengan agenda penguatan integritas (Dai & Chen, 2025). Hubungan ini relevan terutama ketika pendidikan menghadapi banjir informasi dan normalisasi jalan pintas, sehingga literasi dan integritas perlu dipikirkan sebagai paket kebudayaan belajar.

Di Indonesia, pembahasan integritas di madrasah sering hadir dalam bingkai kebijakan, program karakter, atau isu kecurangan akademik, tetapi relatif jarang dibaca

sebagai warisan ethos kelembagaan yang ditopang oleh genealogi institusi. Artikel ini menempatkan MAN 1 Yogyakarta sebagai kasus untuk memahami integritas sebagai nilai inti yang memiliki akar historis pada fase SGHA dan PHIN, yakni lembaga yang mula-mula terkait dengan kaderisasi profesi publik keagamaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis narasi institusional, artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana transformasi kelembagaan membentuk fondasi ethos integritas, bagaimana nilai tersebut diwariskan dan ditegakkan melalui mekanisme sosial dan struktural, serta bagaimana ia termanifestasi pada praktik komunikasi aspirasi melalui Sarasehan MPS dan pada agenda literasi yang masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pembacaan integritas sebagai kultur institusional yang hidup, sekaligus menawarkan refleksi tentang keseimbangan antara ketegasan penegakan dan ruang pemulihan yang mendidik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi historis-reflektif untuk membaca integritas sebagai ethos kelembagaan. Data utama diperoleh melalui wawancara tertulis terstruktur dengan informan dari MAN 1 Yogyakarta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kelembagaan terkait genealogi SGHA-PHIN, budaya integritas, serta praktik partisipasi siswa melalui Sarasehan MPS. Untuk memperkuat konteks, temuan wawancara dipadankan dengan informasi kelembagaan yang tersedia secara terbatas, terutama linimasa perubahan nama dan mandat institusi. Data dianalisis secara deskriptif-tematik melalui tahap reduksi, pengelompokan isu, penetapan tema, dan penulisan narasi interpretatif yang menjaga kedekatan dengan pernyataan informan. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan prinsip kehati-hatian etis, termasuk penggunaan informasi secukupnya, konfirmasi makna pada bagian yang berpotensi ambigu, dan penyajian temuan tanpa mengekspos rincian yang tidak relevan.

Hasil

Transformasi SGHA-PHIN ke MAN 1 Yogyakarta

Sejarah MAN 1 Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari fase awal pembentukan pendidikan kader keagamaan negara yang berorientasi pada kebutuhan profesi hakim agama. Berdasarkan keterangan informan kunci, SGHA berfungsi sebagai sekolah yang menyiapkan kader hakim agama Islam melalui jalur pendidikan menengah yang secara eksplisit menekankan pembentukan karakter dan kedisiplinan profesi. Dalam konteks ini, integritas bukan sekadar tema moral yang diajarkan, melainkan prasyarat etis bagi jabatan publik yang menyangkut otoritas keagamaan dan kepercayaan sosial.

Transformasi kelembagaan kemudian mengarah pada PHIN sebagai bentuk peneguhan mandat tersebut. Informan menjelaskan bahwa pada tahun 1954 SGHA beralih menjadi PHIN, yakni pendidikan hakim Islam negeri. Perubahan ini dapat dipahami sebagai langkah institusional untuk memperjelas orientasi kaderisasi dan memperkuat legitimasi jalur pendidikan hakim dalam kerangka negara. Dengan demikian, sejak fase awal, ethos integritas melekat pada identitas lembaga karena tujuan pendiriannya terkait langsung dengan pembentukan profesional yang dituntut menjaga kejujuran, konsistensi ucapan dan tindakan, serta tanggung jawab moral di ruang publik.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran standar profesional dalam rekrutmen hakim agama. Informan menekankan bahwa kebutuhan sistem hukum dan perubahan kualifikasi profesi membuat hakim agama tidak lagi cukup berlatar pendidikan setingkat SMA, melainkan dituntut memiliki pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum. Dampaknya, jalur pendidikan yang semula dirancang sebagai penyedia langsung kader hakim pada tingkat menengah menjadi kurang memadai. Mereka yang ingin menjadi hakim agama, termasuk lulusan SGHA dan PHIN, harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Perubahan prasyarat ini memiliki konsekuensi mendasar bagi orientasi lembaga. Ketika jalur menengah tidak lagi menjadi terminal profesi, mandat pendidikan bergeser dari model kaderisasi profesi spesifik menuju model pendidikan menengah yang lebih umum. Namun, perubahan orientasi tersebut tidak dengan sendirinya menghapus nilai asal; justru pengalaman historis sebagai lembaga kaderisasi profesi publik menyediakan fondasi etis

yang kuat. Dalam perspektif ini, integritas dapat dipahami sebagai warisan kelembagaan yang tetap relevan meskipun fungsi formal institusi mengalami reposisi.

Linimasa perubahan nama yang disampaikan informan memperlihatkan arah penyesuaian lembaga terhadap tuntutan sistem pendidikan dan profesi. Setelah fase PHIN pada 1954, lembaga bertransformasi menjadi MAN Yogyakarta I pada 1978. Perubahan nomenklatur ini menandai perluasan mandat dari pendidikan yang berorientasi kaderisasi hakim menuju madrasah aliyah dengan cakupan pendidikan yang lebih umum. Selanjutnya, pada tahun 2015, MAN Yogyakarta I berubah menjadi MAN 1 Yogyakarta, yang menunjukkan penegehuan identitas kelembagaan dalam format penamaan modern.

Rangkaian perubahan ini penting dibaca sebagai indikator pergeseran mandat, bukan sekadar administrasi. Ketika institusi menyesuaikan diri terhadap perubahan kualifikasi profesi, ia juga memindahkan fokus dari output profesi tertentu ke pembentukan lulusan yang lebih luas. Akan tetapi, kesinambungan nilai tetap dapat ditelusuri pada aspek ethos, yakni cara lembaga memaknai karakter ideal lulusan. Di sini, integritas berperan sebagai jembatan antara fase historis kaderisasi profesi hakim dan fase kontemporer sebagai madrasah unggulan.

Secara konseptual, transformasi SGHA–PHIN menjadi MAN dapat dibaca sebagai perubahan bentuk organisasi pendidikan yang mengikuti tuntutan profesionalisasi dan sistem pendidikan nasional. Informan menyatakan bahwa perubahan menjadi MAN terjadi karena kebutuhan hakim agama mengharuskan kualifikasi sarjana, sehingga lembaga kemudian menjadi sekolah yang “lebih umum”. Namun, dalam pembacaan ethos, warisan paling berharga justru terletak pada nilai yang dibawa dari fase awal, terutama integritas sebagai standar moral yang mengikat.

Dengan menempatkan sejarah sebagai dasar ethos, narasi transformasi ini menjadi lebih dari sekadar pergantian nama. Ia menjelaskan mengapa integritas memperoleh posisi istimewa dalam budaya MAN 1 Yogyakarta: nilai tersebut tumbuh dari kebutuhan historis untuk menyiapkan kader jabatan publik yang menuntut kepercayaan, akuntabilitas, dan kejujuran. Warisan nilai ini tampak dalam cara komunitas madrasah mendefinisikan integritas secara operasional, menegakkannya dalam praktik, dan menurunkannya dari satu generasi warga madrasah ke generasi berikutnya.

Integritas sebagai Warisan Nilai

MAN 1 Yogyakarta tumbuh dari sejarah pendidikan kader keagamaan negara yang sejak awal menempatkan etika publik sebagai fondasi. Dalam narasi informan kunci, integritas tidak hadir sebagai istilah baru, melainkan sebagai warisan etis yang bertahan dari masa SGHA dan PHIN. Orientasi awal lembaga yang menyiapkan kader untuk peran publik keagamaan menuntut adanya kejujuran dan akuntabilitas; karena itu, integritas berkembang menjadi nilai yang mengikat, membentuk cara warga madrasah memahami martabat, kepantasan, dan kelayakan untuk dipercaya.

Secara operasional, integritas dipahami sebagai konsistensi antara ucapan dan tindakan serta penolakan terhadap segala bentuk kecurangan. Definisi ini tidak disajikan dalam bentuk konseptual abstrak, melainkan melalui cara komunitas menilai perilaku sehari-hari. Informan menegaskan bahwa integritas “dinilai sangat tinggi” sehingga tindakan yang dianggap tidak berintegritas, khususnya kecurangan, segera memicu penilaian sosial yang kuat. Dalam kerangka ini, integritas bekerja sebagai norma institusional yang membentuk ekspektasi bersama tentang apa yang dianggap pantas, bermartabat, dan layak dipercaya.

Menariknya, integritas di MAN 1 Yogyakarta tidak dibatasi pada subjek tertentu, tetapi diproyeksikan lintas aktor. Informan menyatakan bahwa standar ini berlaku bagi siswa, guru, jajaran manajemen, dan pimpinan madrasah. Dengan demikian, integritas beroperasi sebagai mata uang reputasi yang mengatur relasi sosial di lingkungan madrasah. Konsekuensi pelanggaran tidak hanya berupa sanksi administratif, melainkan “hukuman sosial” dan stigma yang tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa budaya integritas dipelihara terutama melalui mekanisme sosial yang menegaskan batas-batas perilaku yang dapat diterima.

Selain sebagai norma internal, integritas juga diposisikan sebagai identitas yang dapat dikomunikasikan secara eksternal. Informan, yang berperan dalam kehumasan, menyebut

adanya upaya membranding ulang “Mansatu” melalui penegasan sejarahnya sebagai SGHA dan PHIN yang menjunjung tinggi integritas. Pernyataan bahwa “ketika orang menanyakan tentang Mansatu dengan satu kata, integritas itu cukup mewakili” memperlihatkan bagaimana nilai ini dijadikan penanda diferensial. Integritas bukan hanya tujuan pembinaan, melainkan ringkasan makna institusi yang ingin dikenali publik.

Dalam artikulasi nilai, integritas kemudian dipaketkan bersama kejujuran dan kebijaksanaan. Informan mengaitkannya dengan simbol “Al-Hakim”, yang ditafsirkan sebagai kebijaksanaan, sekaligus sebagai arah pembentukan lulusan. Dengan kata lain, integritas tidak dipahami semata-mata sebagai kepatuhan pada aturan, tetapi sebagai karakter yang diharapkan melekat pada lulusan ketika mereka memasuki ruang sosial yang lebih luas. Visi ini menempatkan madrasah sebagai ruang pembentukan calon pemimpin yang memegang teguh kejujuran, kebijaksanaan, dan akuntabilitas.

Kultur yang mengandalkan stigma kuat memang efektif menjaga standar perilaku, tetapi ia perlu disertai ruang pemulihan agar integritas tetap menjadi proses pendidikan. Ketegasan penegakan akan lebih sehat bila diimbangi mekanisme pembinaan yang jelas, proporsional, dan adil, sehingga pelanggaran diperlakukan sebagai kesempatan koreksi tanpa mengabaikan akuntabilitas. Dengan keseimbangan ini, integritas tetap hidup sebagai ruh yang membentuk, bukan sekadar batas yang mengecualikan.

Praktik Pewarisan dan Sanksi Sosial

Budaya integritas di MAN 1 Yogyakarta tidak bertahan hanya karena slogan, melainkan karena ia ditanamkan melalui praktik kelembagaan yang berulang dan konsisten. Informan kunci menggambarkan dua jalur yang berjalan bersamaan. Pertama, jalur persuasif melalui pembiasaan, keteladanan, dan pembinaan yang menekankan bahwa kejujuran adalah ukuran martabat personal. Kedua, jalur struktural melalui aturan yang jelas, cara penanganan pelanggaran, dan perhatian institusi yang tegas terhadap isu-isu integritas. Kombinasi keduanya membuat integritas hadir sebagai norma yang terasa nyata dalam keseharian, bukan sekadar pesan moral yang berhenti di ruang kelas.

Di dalam kultur semacam ini, kontrol sosial memainkan peran yang menonjol. Informan menekankan bahwa pelanggaran integritas tidak berhenti pada konsekuensi administratif, melainkan segera memunculkan stigma dan hukuman sosial yang kuat. Kehilangan kepercayaan menjadi konsekuensi utama yang dirasakan, karena reputasi integritas diperlakukan sebagai prasyarat untuk dilibatkan dalam aktivitas, dipercaya memegang amanah, atau menjadi representasi institusi. Dengan demikian, integritas bekerja sebagai mata uang sosial yang menentukan akses pada kesempatan dan legitimasi.

Dinamika tersebut tampak jelas dalam ilustrasi kasus yang disampaikan informan. Ia menceritakan seorang siswa yang cerdas, berprestasi, dan memiliki relasi sosial yang baik, namun pernah melakukan kecurangan saat ujian. Sekali pelanggaran itu terjadi, konsekuensinya dirasakan cukup panjang: keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan mulai dikurangi, meskipun kapasitas akademik dan sosialnya tidak dipersoalkan. Kisah ini memperlihatkan bahwa budaya integritas tidak hanya menilai kompetensi, tetapi juga menilai kelayakan moral untuk dipercaya, terutama ketika institusi sedang menjaga citra dan disiplin internal.

Logika yang sama tampak pada konteks kepemimpinan siswa. Informan menyebut seorang siswa kelas 12 yang pernah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, tetapi tidak memperoleh rekomendasi karena memiliki rekam jejak yang dianggap mencederai integritas. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang mensyaratkan reputasi moral. Keunggulan elektoral atau potensi dukungan suara tidak otomatis mengatasi pertimbangan integritas, karena legitimasi kepemimpinan diikat oleh kepercayaan yang dibangun melalui konsistensi perilaku.

Pada saat yang sama, praktik sanksi sosial yang kuat juga menuntut kehati-hatian agar tidak berubah menjadi pelabelan permanen. Ketika kontrol norma bergantung pada stigma, budaya integritas memang dapat efektif mengurangi deviasi, tetapi berisiko menutup ruang pemulihan bagi individu yang melakukan kesalahan. Karena itu, keberlanjutan budaya integritas akan lebih sehat jika ketegasan penegakan diimbangi dengan jalur pembinaan yang

jelas, proporsional, dan adil. Dengan cara ini, integritas tetap menjadi ethos pendidikan yang membentuk karakter dan tanggung jawab, bukan sekadar mekanisme eksklusif yang mengunci identitas seseorang pada satu peristiwa pelanggaran.

Sarasehan MPS dan Literasi dalam Konteks Integritas

Dalam kehidupan kelembagaan MAN 1 Yogyakarta, integritas tidak hanya tampil dalam ranah kepatuhan akademik, tetapi juga dalam praktik komunikasi publik di antara warga madrasah. Informan kunci menempatkan Sarasehan MPS sebagai salah satu ruang yang memungkinkan siswa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan madrasah. Aspirasi tersebut tidak dilepas begitu saja, melainkan melalui proses penyaringan oleh pengurus MPS sehingga tetap mengandung kejujuran, tetapi tidak meninggalkan nilai kesantunan. Mekanisme ini penting karena membangun tradisi kritik yang beradab: murid belajar menyampaikan keberatan, usulan, dan pengalaman mereka tanpa merusak martabat pihak lain.



Gambar 1. Suasana Sarasehan MPS sebagai forum penyampaian aspirasi siswa di MAN 1 Yogyakarta.

Dalam kerangka budaya integritas, Sarasehan MPS dapat dibaca sebagai bentuk integritas komunikatif. Kejujuran tidak dipahami sebagai kebebasan berkata apa pun, melainkan keberanian menyampaikan kebenaran dengan adab dan tanggung jawab. Informan menilai forum ini relevan untuk menjaga kualitas hubungan antara siswa dan manajemen, sekaligus menjadi wahana pendidikan demokratis di lingkungan madrasah. Dengan demikian, integritas tidak hanya diukur dari tidak menyontek atau tidak berbuat curang, tetapi juga dari kemampuan mengelola perbedaan dan ketegangan secara dewasa, jernih, dan santun.



Gambar 2. Dokumentasi peserta Sarasehan MPS sebagai praktik partisipasi siswa di MAN 1 Yogyakarta.

Namun, keberlanjutan forum aspirasi semacam ini sangat ditentukan oleh keseriusan tindak lanjut. Informan menyampaikan adanya kegelisahan bahwa penyikapan pimpinan terhadap Sarasehan selama ini belum cukup serius, sehingga sebagian siswa mulai mempertanyakan manfaatnya. Ketika aspirasi tidak ditanggapi secara memadai, forum berisiko mengalami penurunan partisipasi dan kehilangan daya percaya. Dalam situasi tersebut, Sarasehan mudah bergeser menjadi kegiatan simbolik yang sekadar menyerap

keluhan tanpa menghasilkan perbaikan. Karena itu, penguatan Sarasehan menuntut tata kelola respons yang jelas, misalnya mekanisme umpan balik yang transparan, penjelasan alasan ketika aspirasi belum dapat dipenuhi, serta rencana tindak lanjut yang realistis.

Pada sisi lain, informan juga menilai budaya literasi di MAN 1 Yogyakarta masih perlu ditingkatkan. Penilaian ini penting ditempatkan dalam konteks integritas, karena literasi yang kuat berfungsi sebagai pagar integritas akademik dan moral. Literasi tidak hanya soal kebiasaan membaca, tetapi juga kemampuan menimbang informasi, menyusun argumen, dan bertanggung jawab atas klaim. Ketika literasi lemah, integritas akademik rentan turun karena siswa kurang terbiasa bekerja dengan bukti, sumber, dan penalaran yang tertib. Sebaliknya, ketika literasi menjadi budaya, integritas memperoleh dukungan yang lebih kokoh, karena kejujuran akademik tidak berhenti pada larangan kecurangan, tetapi berkembang menjadi disiplin berpikir dan tanggung jawab intelektual.

Dua catatan ini, yakni penguatan Sarasehan MPS dan penguatan literasi, saling terkait dalam menjaga integritas sebagai ruh kelembagaan. Sarasehan yang sehat membutuhkan siswa yang mampu merumuskan aspirasi secara jelas, berbasis pengalaman dan data sederhana, serta menyampaikannya dengan bahasa yang tertib. Pada saat yang sama, literasi yang kuat akan lebih bermakna ketika ditautkan pada praktik partisipasi, dialog, dan perbaikan institusi. Dengan memperkuat keduanya, ethos integritas di MAN 1 Yogyakarta tidak hanya dipertahankan melalui kontrol dan sanksi sosial, tetapi juga dihidupkan melalui komunikasi yang beradab, pembelajaran yang reflektif, dan tata kelola aspirasi yang akuntabel.

Diskusi

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa integritas di lingkungan sekolah lebih tepat dipahami sebagai kultur institusional daripada sekadar atribut moral individu. Pada MAN 1 Yogyakarta, integritas dibingkai sebagai ethos yang memiliki akar historis pada mandat awal SGHA dan PHIN dalam menyiapkan kader untuk peran publik keagamaan. Pola ini selaras dengan kajian tentang budaya integritas yang menekankan peran kepemimpinan, konsistensi kebijakan, pembiasaan, serta keterlibatan komunitas sekolah dalam membentuk standar perilaku yang dianggap layak dipercaya (Campbell & Waddington, 2024; Çelik & Razi, 2023). Dalam bahasa iklim etis, integritas berfungsi sebagai norma bersama yang menstrukturkan cara warga madrasah menilai benar dan salah, serta menentukan reputasi dan legitimasi (Din et al., 2025).

Di sisi lain, temuan tentang kuatnya sanksi sosial menunjukkan bahwa kontrol norma integritas di MAN 1 Yogyakarta banyak bekerja melalui mekanisme reputasi dan kepercayaan. Strategi ini berpotensi efektif sebagai deterrence, tetapi juga menimbulkan risiko pelabelan permanen yang menghambat pemulihan. Literatur tentang penegakan integritas memperlihatkan bahwa strategi berbasis kepatuhan dan pengingat kebijakan dapat menghasilkan efek jangka pendek pada perilaku tertentu (Zhao et al., 2023), tetapi penguatan integritas sebagai ethos cenderung lebih berkelanjutan ketika institusi menempuh pendekatan edukatif dan pembinaan yang konsisten (Dai & Chen, 2025; Fudge et al., 2022). Pada ranah disiplin sekolah, pendekatan restoratif menawarkan kerangka untuk menjaga akuntabilitas sekaligus membuka ruang pemulihan relasi dan kesejahteraan sosial-emosional, sehingga integritas tetap dimaknai sebagai proses pendidikan, bukan sekadar perangkat eksklusi (Anyon et al., 2016; Gomez et al., 2020; Huguley et al., 2022).

Temuan mengenai Sarasehan MPS menegaskan bahwa integritas juga beroperasi pada ranah komunikasi dan partisipasi. Aspirasi yang disaring agar jujur tetapi santun menunjukkan praktik integritas komunikatif yang relevan bagi pendidikan demokratis di madrasah. Namun, kekhawatiran informan tentang rendahnya tindak lanjut pimpinan menandakan pentingnya mekanisme umpan balik yang menutup siklus partisipasi. Literatur student voice menegaskan bahwa partisipasi siswa hanya akan bermakna jika institusi mampu menunjukkan respons yang dapat diverifikasi, sehingga forum aspirasi tidak terdegradasi menjadi simbolik (Young & Jerome, 2020). Dalam perspektif deliberative capacity, efektivitas forum partisipasi ditentukan oleh desain pengambilan keputusan dan

kemampuan institusi mengonversi aspirasi menjadi perbaikan prosedur atau penjelasan yang akuntabel (Kennedy & Pek, 2022).

Catatan tentang budaya literasi yang masih perlu ditingkatkan memperluas pemahaman integritas ke wilayah disiplin pengetahuan. Literasi yang kuat memperkecil ruang normalisasi jalan pintas karena siswa dibiasakan bekerja dengan bukti, menyusun argumen, dan bertanggung jawab atas klaim. Sejalan dengan itu, kajian tentang praktik literasi dalam pendidikan menekankan bahwa literasi tidak berhenti pada kebiasaan membaca, tetapi mencakup tata cara pengetahuan yang bertanggung jawab dan berorientasi etis (Christidis et al., 2025; Dai & Chen, 2025). Dalam konteks era GenAI, agenda ini menjadi semakin penting karena penguatan integritas menuntut kerangka yang lebih holistik, tidak semata pengawasan, melainkan pembangunan kompetensi, refleksi etis, dan kultur akademik yang jelas (Rasul et al., 2024).

Secara keseluruhan, kasus MAN 1 Yogyakarta memperlihatkan bahwa integritas sebagai ethos dapat hidup melalui tiga poros yang saling terkait: kesinambungan nilai historis, kontrol sosial dan struktural yang konsisten, serta tata kelola partisipasi dan literasi yang akuntabel. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sumber data yang bergantung pada satu informan kunci dan informasi kelembagaan yang terbatas, sehingga temuan lebih tepat dibaca sebagai narasi institusional yang kaya, bukan generalisasi lintas madrasah. Penelitian lanjutan dapat memperluas sumber data melalui dokumen arsip, wawancara multipihak, dan telaah historiografi pendidikan Islam Indonesia untuk memperkuat pembacaan genealogi SGHA–PHIN dan transformasinya dalam dinamika kebijakan pendidikan.

Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa integritas di MAN 1 Yogyakarta bekerja sebagai ethos kelembagaan yang berakar pada genealogi SGHA dan PHIN, kemudian berlanjut dan beradaptasi ketika lembaga bertransformasi menjadi MAN. Integritas dipelihara sebagai norma bersama yang mengikat lintas aktor melalui kombinasi mekanisme struktural dan kontrol sosial, sehingga reputasi kejujuran menjadi prasyarat kepercayaan, partisipasi, dan legitimasi, termasuk dalam konteks kepemimpinan siswa. Pada saat yang sama, temuan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketegasan penegakan dan jalur pembinaan, agar integritas tetap menjadi proses pendidikan yang membentuk karakter tanpa mengunci individu pada stigma yang permanen.

Selain ranah akademik, integritas juga tampil sebagai integritas komunikatif melalui Sarasehan MPS, yang membuka ruang aspirasi siswa secara jujur dan santun, namun membutuhkan tata kelola tindak lanjut yang lebih akuntabel agar tidak kehilangan daya percaya. Penguatan budaya literasi dipandang sebagai fondasi penting bagi integritas akademik dan moral, terutama pada era GenAI, karena literasi memperkuat disiplin pengetahuan, tanggung jawab terhadap klaim, dan kebiasaan bekerja dengan bukti. Keterbatasan studi ini terletak pada cakupan sumber data yang terbatas; karena itu, penelitian berikutnya disarankan memperluas triangulasi melalui arsip kelembagaan, wawancara multipihak, dan telaah historiografi pendidikan Islam Indonesia untuk memperkaya pembacaan warisan ethos integritas dan relevansinya bagi penguatan budaya madrasah kontemporer.

Referensi

- Anyon, Y., Gregory, A., Stone, S., Farrar, J., Jenson, J., McQueen, J., Downing, B., Greer, E., & Simmons, J. (2016). Restorative Interventions and School Discipline Sanctions in a Large Urban School District. *American Educational Research Journal*, 53, 1663–1697. <https://doi.org/10.3102/0002831216675719>
- Campbell, C., & Waddington, L. (2024). Academic Integrity Strategies: Student Insights. *Journal of Academic Ethics*, 22, 33–50. <https://doi.org/10.1007/s10805-024-09510-1>
- Çelik, Ö., & Razi, S. (2023). Facilitators and barriers to creating a culture of academic integrity at secondary schools: An exploratory case study. *International Journal for Educational Integrity*, 19, 1–30. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00125-4>

- Christidis, M., Christidis, N., Lindberg, V., Gottberg, K., & Georg, C. (2025). Intended and experienced literacy practices in a Swedish undergraduate nursing education. *PLOS One*, *20*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335166>
- Dai, L., & Chen, Q. (2025). The Era Demands and Construction Paradigm of Integrating Scientist Spirit into Graduate Academic Literacy: A Preliminary Exploration. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research*. <https://doi.org/10.56028/aehtsr.14.1.39.2025>
- Din, Q. M. U., Tahir, A., Yang, X., Alqahtani, S., & Gul, N. (2025). Ethical climate in higher education: The interplay of leadership, moral efficacy, and team cohesion in diverse cultural contexts. *Acta Psychologica*, *255*, 104986. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104986>
- Friedland, J., & Jain, T. (2020). Reframing the Purpose of Business Education: Crowding-in a Culture of Moral Self-Awareness. *Journal of Management Inquiry*. <https://doi.org/10.1177/1056492620940793>
- Fudge, A., Ulpen, T., Bilic, S., Picard, M., & Carter, C. (2022). Does an educative approach work? A reflective case study of how two Australian higher education Enabling programs support students and staff uphold a responsible culture of academic integrity. *International Journal for Educational Integrity*, *18*. <https://doi.org/10.1007/s40979-021-00099-1>
- Gomez, J., Rucinski, C., & Higgins-D'Alessandro, A. (2020). Promising pathways from school restorative practices to educational equity. *Journal of Moral Education*, *50*, 452–470. <https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1793742>
- Hill, G., Mason, J., & Dunn, A. (2021). Contract cheating: An increasing challenge for global academic community arising from COVID-19. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, *16*. <https://doi.org/10.1186/s41039-021-00166-8>
- Huguley, J., Fussell-Ware, D., McQueen, S., Wang, M.-T., & DeBellis, B. (2022). Completing the Circle: Linkages Between Restorative Practices, Socio-Emotional Well-Being, and Racial Justice in Schools. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, *30*, 138–153. <https://doi.org/10.1177/10634266221088989>
- Kennedy, J., & Pek, S. (2022). Mini-publics, student participation, and universities' deliberative capacity. *Studies in Higher Education*, *48*, 63–82. <https://doi.org/10.1080/03075079.2022.2111551>
- Rasul, T., Nair, S., Kalendra, D., Balaji, M., Santini, F., Ladeira, W., Rather, R., Yasin, N., Rodriguez, R., Kokkalis, P., Murad, M. W., & Hossain, M. U. (2024). Enhancing academic integrity among students in GenAI Era: A holistic framework. *The International Journal of Management Education*. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.101041>
- Young, H., & Jerome, L. (2020). Student voice in higher education: Opening the loop. *British Educational Research Journal*. <https://doi.org/10.1002/berj.3603>
- Zhang, Y. (2023). Academic cheating as planned behavior: The effects of perceived behavioral control and individualism-collectivism orientations. *Higher Education*, 1–24. <https://doi.org/10.1007/s10734-023-01024-w>
- Zhao, L., Peng, J., Yang, X.-Z., Yan, W., Ke, S., Batool, K., Li, Y., & Lee, K. (2023). Effects of academic dishonesty policy reminder on university students' exam cheating – a double-blind randomized controlled experimental field study. *Studies in Higher Education*, *49*, 592–608. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2246073>
- Zhu, W. (2025). The importance of promoting a culture of academic integrity in higher education institutions in China. *Psicologia, Reflexão e Crítica : Revista Semestral Do*

Departamento de Psicologia Da UFRGS, 38. <https://doi.org/10.1186/s41155-025-00367-w>